

KEBIJAKAN KOREA SELATAN MENGGUNAKAN BANTUAN IMF DALAM MENGHADAPI KRISIS MONETER ASIA TAHUN 1997

Rahmad Dwi Hartanto

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRAK

Krisis Keuangan Asia diawali dengan jatuhnya mata uang Baht Thailand pada Juni 1997, krisis ini melanda hampir semua negara di Asia, salah satunya Korea Selatan. Korea Selatan yang saat itu menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke-11 dunia, turut menerima imbas krisis Thailand. Tanggal 23 Januari tahun 1997, salah satu perusahaan besar Korea Selatan yaitu 'Hanbo Iron&Steel' menjadi bangkrut akibat obligasi yang tidak ada harganya dan di dalam proses pinjaman dana yang besar itu, terdapat korupsi yang melibatkan dunia politik dan keuangan. Hal ini membuat para investor asing yang kehilangan minat pada pasar Korea Selatan meninggalkan pasar saham, sehingga harga saham kolaps dan nilai tukar mata uang won terhadap dolar Amerika juga anjlok. Karena situasi ini, akhirnya, pada bulan November, agenda untuk meminta bantuan keuangan kepada IMF dibahas secara terbuka, dan Korea Selatan memasuki kerangka IMF mulai tanggal 3 Desember 1997. Selama masa peminjaman bantuan IMF, Korea Selatan berhasil pulih dengan cepat dan dapat membayar utangnya 3 tahun lebih cepat dari target yang diagendakan. Adapun faktor yang mempengaruhi cepatnya proses pemulihan Korea Selatan adalah faktor eksternal dan internal yang dimana eksternal berupa kesepakatan dengan IMF dan internal berupa kebijakan dari pemerintah Korea Selatan dalam menangani krisis moneter Asia pada tahun 1997

Kata Kunci : *Korea Selatan, IMF, Krisis Moneter, Asia, Kebijakan*

ABSTRACT

The Asian financial crisis began with the fall of the Thai Baht in June 1997, this crisis struck almost all countries in Asia, one of which was South Korea. South Korea then became the country with the world's 11th largest economy, also receiving the impact of the Thai crisis. On 23 January 1997, one of South Korea's big companies, ' Hanbo Iron & Steel ' became bankrupt due to bonds that were not priced and in the process of large funds loans, there was

corruption involving the world of politics and Financial. This made foreign investors who lost interest in the South Korean market to leave the stock market, so the price of the collapse stocks and the exchange rate of the won currency against the American dollar were also dropped. Due to this situation, finally, in November, the agenda to solicit financial assistance to the IMF was discussed openly, and South Korea entered the IMF framework starting on December 3, 1997. During the IMF aid loan, South Korea is able to recover quickly and pays its debts 3 years faster than scheduled targets. The factors that affect the rapid recovery process of South Korea are external and internal factors that are in the form of an agreement with the IMF and internal policy of the South Korean government in handling the monetary crisis of Asia in 1997.

Keywords: *South Korea, IMF, Monetary Crisis, Asia, Policy*

Pendahuluan

Korea Selatan merupakan negara yang memiliki kekuatan ekonomi yang kuat. Korea Selatan dapat bertahan dalam melewati krisis moneter Asia atau *Asian Financial Crisis* yang melanda hampir seluruh negara di Kawasan Asia. Korea Selatan, Thailand, dan juga Indonesia merupakan negara-negara yang mengalami dampak paling parah dari terjadinya krisis tersebut. Pemerintah Korea Selatan sampai harus meminjam dana bantuan dari IMF agar dapat keluar dari krisis tersebut.

Krisis Moneter Asia yang terjadi pada tahun 1997 melanda hampir semua negara di Asia, termasuk Korea Selatan. Akan tetapi, Korea Selatan dapat terselamatkan dari krisis tersebut. Tentunya ada beberapa upaya yang melatar-belakangi kesuksesan Korea Selatan dalam melewati Krisis Moneter Asia tahun 1997 itu.

Korea Selatan, Indonesia dan Thailand adalah negara-negara yang terkena dampak krisis terparah. Laos, Malaysia, dan Filipina juga terdampak oleh turunnya nilai mata uang. Brunei, Cina, Singapura, Taiwan, dan Vietnam tidak kentara dampaknya, namun sama-sama merasakan turunnya permintaan dan kepercayaan investor di seluruh Asia. Rasio utang PDB asing naik dari 100% menjadi 167% di empat negara ASEAN pada tahun 1993–1996, lalu melonjak hingga 180% pada masa-masa terparah dalam krisis ini. Di Korea Selatan, rasionya naik dari 13% menjadi 21%, lalu memuncak di angka 40%. Negara industri baru lainnya masih lebih baik. Kenaikan rasio pembayaran utang ekspor hanya dialami oleh Thailand dan Korea Selatan. Meski sebagian besar negara di Asia memiliki kebijakan fiskal yang bagus, Dana Moneter Internasional (IMF) turun tangan melalui program senilai US\$40 miliar untuk

menstabilkan mata uang Korea Selatan, Thailand, dan Indonesia, negara-negara yang terdampak parah dalam krisis ini.

Januari tahun 1997, 'Hanbo Iron&Steel' menjadi bangkrut akibat obligasi yang tidak ada harganya sebesar 5 triliun 700 miliar won. Di dalam proses pinjaman dana yang besar itu, terdapat korupsi yang melibatkan dunia politik dan keuangan. Kasus Grup Hanbo bukan hanya bangkrutnya sebuah perusahaan, tetapi juga menjadi awal yang mengguncang perekonomian nasional. Setelah itu, berbagai perusahaan besar juga turut menjadi bangkrut. Akibat bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar, maka dunia keuangan juga mengalami kesulitan, sampai tidak bisa membayar dana yang dipinjam dari luar negeri. Karenanya, cadangan devisa turun drastis, dan bank juga menghadapi krisis bangkrut. Selain itu, krisis ekonomi di Asia Timur membuat perekonomian Korea Selatan menjadi lebih sulit.

Akibat sinyal merah bagi ekonomi Korea Selatan, para investor asing yang kehilangan minat pada pasar Korea Selatan meninggalkan pasar saham, sehingga harga saham kolaps dan nilai tukar mata uang won terhadap dolar Amerika juga anjlok. Akhirnya, pada bulan November, agenda untuk meminta bantuan keuangan kepada IMF dibahas secara terbuka, dan Korea Selatan memasuki kerangka IMF mulai tanggal 3 Desember 1997 (KBS WORLD RADIO, 2015). Namun demikian, selama masa krisis, Korea Selatan berhasil pulih lebih cepat dari negara-negara lain, hal ini ditunjukkan dengan keberhasilan Korea Selatan melunasi hutang dengan IMF 3 tahun lebih cepat dari yang diagendakan.

Teori Developmental State (Oleh Chalmers Johnson)

Teori *developmental state* atau teori pembangunan negara adalah teori yang membahas relasi antara negara terhadap kegiatan pembangunan di negaranya, dengan menempatkan negara sebagai aktor utama dalam mendorong pembangunan tersebut dengan prioritas pada aktivitas pembangunan. Dalam teori pembangunan negara, gagasan utama yang diusung berangkat dari pemikiran *state-led development* atau negara sebagai pemimpin pembangunan. Jadi, karena negara memegang peran kunci dalam pembangunan, implementasi dari teori ini menuntut adanya pemerintahan yang baik.

Negara diharuskan cukup kuat dan memiliki kemampuan dalam mengontrol wilayah serta sumber daya yang dimiliki. Cara-cara ini semata-mata dilakukan untuk mencapai target pembangunan nasional tertentu (Menocal, 2006).

Menurut Johnson teori pembangunan negara sama sekali tidak menolak investasi asing. Namun, dalam teori ini, investasi yang masuk harus dimanfaatkan semaksimal mungkin guna mendorong pembangunan serta harus dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat.

Karenanya, proses pembangunan negara setidaknya harus memiliki dua atribut utama, yaitu negara harus memiliki kapasitas yang cukup untuk mengontrol kekuasaannya dan untuk mendesain serta menerjemahkannya dalam bentuk kebijakan. Kemudian negara juga harus memiliki strategi yang mumpuni guna mencapai tujuan dan memiliki institusional, serta perspektif politik yang spesifik.

Developmental State tidak hanya menargetkan tujuan untuk pembangunan ekonomi dalam negeri dengan memanfaatkan pasar dalam negeri saja. Perlu diingat bahwa peningkatan kondisi ekonomi yang ditargetkan dalam *developmental state* juga saling berhubungan dengan negara-negara lain, atau dalam tataran perdagangan internasional sebagai bentuk dari liberalisasi perdagangan. Karenanya, setiap negara yang mengimplementasikannya harus memilih strategi yang lebih luas dalam konteks regional dan berkeeseimbangan terhadap kekuasaan internasional.

Dalam kaitannya dengan perbedaan kebijakan Korea Selatan dalam menghadapi krisis moneter Asia tahun 1997 adalah Pemerintah Korea Selatan menerapkan kebijakan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, antara lain dengan cara menerapkan kebijakan hutang luar negeri yang pada akhirnya melahirkan kesepakatan untuk menerima dana bantuan dari IMF dengan menaati sejumlah ketentuan dan persyaratan tertentu atau *structural adjustment programme*. *Structural adjustment programme* adalah proses pemberian dana bantuan atau pinjaman dari IMF kepada negara-negara yang mengalami krisis ekonomi dengan mematuhi ketentuan dan persyaratan tertentu terlebih dahulu.

Memang keberhasilan itu bukanlah semata-mata karena krisis, melainkan juga karena beberapa faktor fundamental lainnya yang telah tumbuh dalam masyarakat Korea Selatan. Salah satu faktor pendukung yang pantas dicatat adalah bahwa tingkat pendidikan masyarakat Korea Selatan relatif tinggi. Begitu juga tingkat GNP perkapita mereka pada waktu krisis sudah mencapai US\$8000. Sehingga tingkat pendidikan dan kekayaan semacam itu dapat mendorong industri Korea Selatan ke arah consensus yang konstruktif dan positif, bukan destruktif ataupun kontraproduktif (UGM, 2005).

Awal Penyebab Krisis

Krisis Keuangan Asia diawali dengan jatuhnya mata uang Baht Thailand pada Juni 1997, akibat ulah para spekulan. Pada saat itu spekulan menjual mata uang Bath dengan harapan dapat menurunkan harga bath yang berharga 26 Bath per 1 Dollar Amerika. Pada akhirnya keinginan para spekulan tersebut berhasil. Karena banyak Bath yang keluar, maka pemerintah Thailand harus membeli mata uang Bath dan menghabiskan cadangan devisa sebesar USD 6,8 juta. Pada Januari 1998, harga Bath jatuh dengan harga 54 Bath per Dollar Amerika (Leightne, 2007).

Pada tahun 1980-an, perekonomian Thailand berjalan stabil dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 9% per tahun. Stabilitasnya perekonomian Thailand saat itu mendorong banyak perusahaan swasta di Thailand untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Karena melihat perekonomian Thailand yang stabil secara makro, bank-bank di Jepang dengan sangat mudah mengucurkan kredit ke berbagai perusahaan di Thailand. Sebelumnya, pada akhir tahun 1996, tibalah masa jatuh tempo pembayaran utang perusahaan-perusahaan swasta di Thailand. Karena pada saat itu banyak perusahaan yang tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka timbul lah ketidakpercayaan di kalangan perbankan Jepang terhadap kapabilitas perusahaan Thailand. Beberapa bank Jepang mempercepat jatuh tempo pembayaran utang.

Akibatnya, masa jatuh tempo pelunasan utang terakumulasi dalam periode yang sama. Ketidakmampuan perusahaan swasta Thailand dalam memenuhi kewajibannya membuat nilai saham perusahaan-perusahaan itu jatuh. Karena banyak nilai saham perusahaan yang anjlok, secara otomatis membuat pasar modal Thailand anjlok pula hingga 75%. Dimulailah krisis finansial di Thailand pada 2 Juli 1997.

Dampak Politik dan Ekonomi

Krisis finansial Asia membawa perubahan yang besar dalam wilayah Asia pasifik. Dengan adanya krisis, paham-paham seperti kapitalisme dan demokrasi menyebar dalam pemerintahan seluruh negara. Setelah krisis berlangsung banyak negara yang menggunakan paham kapitalisme sebagai sistem perekonomian yang digunakan. Negara-negara yang sekarang mendapat julukan NIC's (*New Industrial Countries*) yaitu Korea selatan, Singapura, Hongkong, Taiwan sukses dalam membangun perekonomian wilayah. Bukan hanya negara-negara maju tersebut, negara-negara seperti Indonesia, Thailand juga mulai membuka

perekonomian untuk menarik investor asing masuk untuk menanamkan modal. Seperti contoh dapat dilihat pada contoh berkembangnya bisnis properti di Indonesia yang diminati oleh para konglomerat dan bank- bank pemerintah.

Selain menyebarnya paham kapitalisme, penerapan demokrasi pun marak di gunakan dalam sistem pemerintahan negara-negara Asia, khususnya yang terkena dampak krisis terbesar seperti Indonesia, Malaysia dan Korea Selatan. Mayoritas sistem pemerintahan negara tersebut sebelum krisis merupakan pemerintahan yang bergaya otoritarianisme. Pemerintahan model tersebut sangat mengekang kebebasan dalam berpolitik. Media massa dilarang berbicara, rakyat harus seminimal mungkin berperan dalam pemerintahan. Jika terdapat masalah dalam pemerintahan, maka penyelesaiannya adalah dengan cara militer yang otoriter.

Salah satu contohnya adalah di tahun 1997 pemilu yang telah diagendakan di masa pemerintahan Kim Young Sam dilaksanakan dan memilih Kim Dae Jung sebagai presiden. Kim Dae Jung ini adalah pemimpin oposisi utama Kongres Nasional untuk Politik Baru di masa pemerintahan sebelumnya. Untuk pertama kali dalam sejarah konstitusi Korea Selatan, pembentukan pemerintahan dibuat melalui peralihan kekuasaan secara damai dari pihak partai berkuasa kepada partai oposisi.

Tidak hanya dampak politik yang dirasakan melainkan juga dampak ekonomi. Krisis moneter yang menular sangat cepat terutama di kawasan Asia Pasifik, memaksa negara-negara kawasan menjadikan *International Monetary Fund* atau IMF sebagai rezim moneter yang diharapkan untuk membantu keluar dari krisis. Dampak terburuk dari adanya krisis adalah kegagalan pemerintah untuk membangun iklim kondusif untuk investasi. Karena hambatan tertinggi untuk mencapai investasi adalah instabilitas politik. Investasi dan pertumbuhan mengalami stagnasi, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan meningkat tajam (Hoa & Charles Harvie, 2000).

Di satu sisi memang krisis ini membawa negara Asia ke dalam keterpurukan ekonomi namun krisis ini juga membawa dampak yang baik bagi masa depan negara Asia. Pada masa sekarang terlihat bahwa regionalisme seperti ASEAN sudah mulai dimantapkan. Banyak negara-negara Asia menjadi negara garda terdepan dalam ekonomi seperti China, Singapura, Jepang, Korea selatan. Namun yang lebih penting lagi sudah mulai adanya kesadaran bersama antara negara Asia itu sendiri.

Faktor-Faktor Penyebab Cepatnya Pemulihan Korea Selatan

Korea Selatan merupakan negara yang tercepat dalam pemulihan ekonomi, pada tahun 1999 Korea Selatan mampu mengembalikan angka pertumbuhan ekonominya seperti sebelum krisis. Hal tersebut baru bisa dicapai oleh beberapa negara di kawasan Asia yang terdampak krisis seperti Malaysia dan Philipina pada tahun 2000, sedangkan Indonesia dan Thailand masih belum mampu memulihkan pertumbuhan ekonominya seperti sebelum krisis. Cepatnya proses pemulihan ekonomi di kawasan Asia tidak diduga sebelumnya melihat begitu besarnya tekanan krisis yang menimpa kawasan tersebut hingga menyebabkan jatuhnya nilai tukar mata uang negara-negara tersebut secara signifikan bahkan mengakibatkan runtuhnya sistem nilai tukar tetap yang dianut beberapa negara. Beberapa faktor yang menyebabkan cepatnya proses *recovery* di Korea Selatan adalah faktor eksternal dan internal dari Korea Selatan.

1. Faktor Eksternal

Korea Selatan merupakan salah satu negara yang mendapatkan pinjaman dana dari *International Monetary Fund* (IMF) ketika terjadi krisis moneter tahun 1997. Pinjaman tersebut bernilai US\$40 miliar. Walaupun Korea Selatan adalah negara yang mandiri, tetapi krisis moneter berakibat pada kemunduran ekonomi yang cukup signifikan. Sebagai contoh, perusahaan otomotif KIA Motors mengalami jatuhnya pasar saham dan mengalami kerugian yang besar. Hal itu mendorong Korea Selatan untuk melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pasar, finansial, dan perdagangan. Oleh karena itu, keberadaan dan peran IMF dinilai sangat membantu negara-negara yang sedang mengalami krisis ekonomi seperti Korea Selatan pada tahun 1997. Peran IMF dinilai efektif dalam mengatasi permasalahan krisis moneter di Korea Selatan. Hal ini ditandai dengan bangkitnya perekonomian Korea Selatan yang lebih cepat dari negara-negara Asia lainnya.

Korea Selatan menyetujui keterlibatan IMF selama 3 tahun sejak tanggal 3 bulan Desember 1997. IMF menyediakan kira-kira (pada awalnya) US\$21 miliar dengan program yang terkait dengan upaya reformasi tersebut; kebijakan ekonomi makro, restrukturisasi sektor usaha, pengaturan dan pengawasan sektor keuangan, liberalisasi akuntansi perdagangan dan modal, reformasi pasaran tenaga kerja dan provisi informasi (Warsito, 2007). Dengan pengawasan langsung dari IMF rincian dari peraturan tentang keberhasilan reformasi dijadwalkan sedemikian rupa dan hasilnya dievaluasi secara tahap demi tahap.

Tujuan utama program penyelamatan IMF kepada Korea Selatan adalah untuk memantapkan disiplin pasar agar berlaku dengan tegas di Korea Selatan. IMF tidak hanya berharap agar Korea Selatan dapat pulih dari krisis moneter dengan menyediakan dana talangan melainkan juga berharap agar pasar Korea Selatan menjadi lebih terbuka dan diminati atau boleh dimasuki oleh investor asing.

Alasan IMF untuk membantu mengatasi krisis ekonomi Korea Selatan juga didorong oleh tujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi politik internasional. Dengan menggunakan sistem nilai tukar dan pembayaran internasional yang lebih terbuka dapat meningkatkan penyebaran arus modal antar negara. Dalam aspek pengawasan, IMF memengaruhi kebijakan negara-negara anggota untuk dapat meningkatkan stabilitas ekonomi di negaranya. Sehingga, dapat mengurangi kemungkinan krisis ekonomi di kemudian hari.

IMF menawarkan pinjaman terbesar US\$58 miliar kepada Korea Selatan dari semua negara di Asia Timur dengan berbagai persyaratan. Salah satunya adalah reformasi yang mendasar dari sektor ekonomi, seperti kebijakan fiskal yang ketat, neraca modal, dan liberalisasi perdagangan serta reformasi pasar tenaga kerja (Williamson, 2012).

Setelah restrukturisasi ekonomi yang didukung IMF selama 3 tahun, pasar Korea Selatan menjadi lebih terbuka bagi modal asing. Pada kasus sektor perbankan misalnya, kepemilikan saham asing pada bank-bank komersial utama meningkat 50%; Kookmin (61,2%); Korea Housing (62.4%); KorAm (66%); Shinhan (50.36%). Beberapa saham strategis yang biasanya berpengaruh pada fluktuasi index KOSPI, seperti Samsung Electronics (58.3%), POSCO (95.6%), SK Telecom (48.95%) dan Hyundai Motors (52.24%), dikuasai oleh modal asing. Kepemilikan asing atas perusahaan-perusahaan yang terdaftar menjadi meningkat dari 13% (1996) menjadi 30% (pada bulan Mei 2001). Aset perusahaan modal asing tersebut mencapai 8% dari GDP. Lebih besar 5% dari yang terjadi di Jerman dan lebih besar 0,3% yang di Jepang. Surat kabar terbesar Korea Selatan menyebutkan bahwa Korea Selatan mulai memasuki era “ekonomi darah campuran” (Warsito, 2007).

2. Faktor Internal

Pemerintah Kim Dae Jung selaku presiden yang menjabat pada masa krisis tersebut berpendapat bahwa intervensi yang berlebihan dalam perekonomian telah

mengakibatkan kesulitan ekonomi, dan berjanji menghapus sejumlah regulasi dan pengarahan ekonomi yang otoriter. Tidak seperti pemerintahan sebelumnya, yang mengendalikan pasar, pemerintah Kim Dae Jung menekankan pasar yang menjamin persaingan yang bebas dan adil, oleh karena itu pemerintah Kim Dae Jung melakukan beberapa kiat utama untuk membantu memulihkan ekonomi Korea Selatan dari krisis finansial.

Pertama adalah restrukturisasi perusahaan, termasuk memperbaiki transparansi manajemen perusahaan, menghapus investasi silang dan jaminan pembayaran di antara perusahaan-perusahaan yang dimiliki para *Chaebol*, mengurangi rasio kemampuan bayar utang pada perusahaan, mengkhususkan hanya pada sejumlah kecil sektor kunci dan memperkuat tanggung jawab para pemegang saham.

Kedua adalah reformasi pasar tenaga kerja, termasuk mengurangi pengangguran, menciptakan lapangan kerja, menciptakan jaringan pengaman sosial untuk menstabilkan taraf hidup masyarakat, mengimplementasikan restrukturisasi perusahaan berdasarkan kesepakatan dalam Komisi Tripartit (yang terdiri dari buruh, perusahaan dan pemerintah) dan memperkuat fleksibilitas pasar tenaga kerja.

Ketiga adalah restrukturisasi keuangan, yang merupakan wilayah paling penting dalam reformasi. Di antaranya menghapus intervensi pemerintah dalam manajemen lembaga keuangan, menggairahkan lembaga-lembaga keuangan *non-bank*, menambahkan modal untuk meningkatkan kepercayaan lembaga-lembaga keuangan, mengelola secara aktif kerugian kerugian yang diakibatkan oleh kredit macet, dan memperkuat tanggungjawab para eksekutif perusahaan.

Keempat adalah reformasi sektor publik, termasuk reorganisasi dan pengurangan struktur pemerintahan dan karyawan, mereformasi organisasi-organisasi yang didukung pemerintah, memperkenalkan inovasi manajemen pemerintahan, dan privatisasi BUMN. Penggabungan modal asing secara proaktif dan memberantas korupsi (Lee & Lee, 2019).

Untuk menunjang reformasi sektor publik ini, pemerintahan Kim Dae Jung menetapkan *blue-print* reformasi pemerintahan untuk lima tahun mendatang yang didasarkan pada dua asumsi utama yaitu (1) pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dalam masa transisi ekonomi dari *authoritarian-state-led* menuju *market-led*. Artinya, perubahan orientasi menuju *market-led* tidak serta merta menyebabkan negara

menjadi sama sekali tidak punya peran, melainkan negara justru harus mempunyai peran agar pasar dapat berfungsi dengan baik. (2) Intervensi negara dalam transisi ekonomi merupakan suatu hal yang sangat penting, tetapi intervensi negara di sini dimaksudkan untuk memperkuat pasar. Karenanya negara yang kuat tetap diperlukan, tetapi negara perlu didukung oleh hukum dan konstitusi yang memadai bagi kebutuhan-kebutuhan untuk memperkuat pasar. Disinilah titik penting perbedaan intervensi negara pada masa Kim Dae Jung dan masa sebelumnya.

Logika tersebut mendorong pemerintah untuk menyimpulkan intervensi pemerintah dalam prekeonomian adalah tak terhindarkan dalam kondisi transisional, yaitu selama dasar-dasar ekonomi pasar sedang dalam perbaikan. Dalam rangka mengajak masyarakat untuk meningkatkan peran mereka dalam dukungan kepada pasar (bukan sebagai hambatan pada perekonomian) pemerintah menambahkan bahwa perlu kerja keras untuk membangun lembaga yang sesuai dari merancang aturan-aturan yang diperlukan. Dengan demikian, pemerintah Kim Dae Jung berusaha membedakan dirinya dengan pendahulunya dengan menyatakan bahwa mereka mencoba membantu ekonomi pasar melalui kelembagaan dan hukum.

Selain itu, masyarakat Korea Selatan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya melewati krisis moneter di Asia tahun 1997. Saat krisis melanda, pemerintah Korea Selatan juga turut meminta bantuan masyarakatnya menggalang kampanye untuk mencari dana dan meminjamkan harta yang mereka miliki untuk membangun kembali Korea selatan dari krisis yang dialami saat itu. Walaupun krisis kebangkrutan negara teratasi melalui bantuan moneter IMF, namun masyarakat Korea Selatan terus mengalami kesengsaraan. Sepanjang tahun 1998, 20 ribu unit perusahaan bangkrut, dan perusahaan yang mengatasi krisis mengumumkan rencana restrukturisasi organisasi. Akibatnya, lebih dari 1 juta 300 ribu orang menjadi pengangguran, dan banyak pegawai di bank juga kehilangan tempat kerja. Pada tahun 1998 ketika Korea Selatan di bawah kerangka pengontrolan IMF, pendapatan perkapita PDB mundur ke angka 10 tahun sebelumnya, dan rasio pertumbuhan ekonomi mencatat minus 6,7% untuk pertama kali dalam waktu 18 tahun.

Selain kesulitan ekonomi, harga diri dan pamor warga Korea Selatan juga sangat menurun. Namun, masyarakat Korea Selatan tidak merasa kecewa dan berupaya untuk mengubah krisis dengan harapan. Masyarakat Korea Selatan mulai melakukan 'kampanye untuk mengumpulkan emas' sejak bulan Desember tahun itu sebagai cara untuk membayar utang luar negeri. Kampanye itu diikuti 3 juta 500 ribu orang, dan

media luar negeri memuji-muji semangat warga masyarakat Korea Selatan untuk mengatasi krisis moneter. Emas yang dikumpulkan melalui kampanye itu menjadi landasan untuk melepaskan diri dari krisis nasional (KBS WORLD RADIO, 2015).

Melihat hal ini, strategi yang ditekankan oleh pemerintah Korea inipun berhasil, karena masyarakat menyerahkan segala yang mereka punya demi satu kesatuan kepentingan bersama. Yang mana semua penduduk Korea selatan merasakan penderitaan yang sama dan dalam mengatasi itu mereka bekerja sama dengan tulus dan mempercayakan segalanya kepada pemerintah. Korea selatan dapat menjadi negara yang sangat maju seperti sekarang juga karena adanya nilai Konfusianisme yang masih diterapkan hingga sekarang. Nilai Konfusianisme membuat masyarakat tidak pernah melupakan sejarah dan membuat mereka mencintai negara mereka sepenuh hati (Shin, 2012).

Kesimpulan

Krisis Moneter Asia yang terjadi pada tahun 1997 melanda hampir semua negara di Asia, termasuk Korea Selatan. Akan tetapi, Korea Selatan dapat terselamatkan dari krisis tersebut. Tentunya ada beberapa upaya yang melatar-belakangi kesuksesan Korea Selatan dalam melewati Krisis Moneter Asia tahun 1997 itu. Korea Selatan memiliki kekuatan dan juga kelemahan pasca krisis tersebut berlangsung. Krisis ini bermula di Thailand, jatuhnya nilai mata uang Baht setelah pemerintah Thailand terpaksa mengambangkan baht karena sedikitnya valuta asing yang dapat mempertahankan jangkarnya ke dolar Amerika Serikat.

Beberapa alasan yang menyebabkan cepatnya proses *recovery* di Korea Selatan. Pertama, yang melatarbelakangi cepatnya pemulihan ekonomi di Korea Selatan adalah depresiasi nilai tukar Won terhadap Dollar dan peningkatan kondisi ekonomi global sehingga meningkatkan ekspornya. Faktor kedua yang menyebabkan Korea Selatan mampu memulihkan perekonomiannya lebih cepat adalah restrukturisasi sektor finansial yang cukup agresif. Faktor ketiga yang menyebabkan masa pemulihan ekonomi Korea Selatan lebih cepat adalah performa perekonomian Korea Selatan dalam proses *recovery* telah mampu mengembalikan kepercayaan luar negeri.

Pemerintahan Kim Dae Jung melakukan kebijakan untuk merestrukturisasi kondisi perekonomian Korea Selatan dengan menggunakan bantuan dana dari IMF, *World Bank* dan negara-negara maju lainnya seperti Amerika Serikat dan Jepang. Selanjutnya pemerintahan Kim Dae Jung meminimalisir intervensi pemerintah terhadap pasar, melalui deregulasi ekonomi, privatisasi ekonomi dan liberalisasi pasar modal melalui serangkaian kebijakan

restrukturisasi dan reformasi di sektor korporasi, finansial, tenaga kerja dan publik, dimana serangkaian kebijakan tersebut menimbulkan implikasi terhadap pergeseran pola *state-oriented* menjadi *market-oriented*.

Dari hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah masih tetap sangat diperlukan, dan pertumbuhan ekonomi yang diberikan pada mekanisme pasar bukan berarti tanpa campur tangan pemerintah sedikitpun. *Developmental state* dapat berjalan dengan mengembangkan institusionalisasi sektor publik yang transparan, *accountable*, dan terdesentralisasi, juga reformasi birokrasi, aparat negara, dan sektor publik, juga pemerintah perlu memperluas institusionalisasi hubungan pemerintah dan kelompok bisnis, dan terakhir reformulasi *developmental state model* haruslah difokuskan pada sejumlah fungsi yang dijalankan negara.

Meskipun Korea Selatan menerapkan *market-oriented* tapi dalam hal ini, pasca krisis 1997 tersebut pemerintahan Kim Dae Jung masih tetap mempertahankan model *developmental state* karena kenyataannya model *developmental state* masih memiliki sisi positif dalam pembangunan perekonomian Korea Selatan, hanya saja perlu dilakukan sedikit perubahan terhadap peran negara yang lebih transparan dan demokratis untuk memulihkan perekonomian nasionalnya.

Selain itu, peranan masyarakat guna membantu pemerintah dalam menangani krisis moneter Asia pada tahun 1997 juga sangat penting, kesadaran masyarakat untuk membangun negara secara bersama sama menjadi salah satu alasan Korea Selatan dapat pulih dari krisis dengan cepat.

Hasil akhir dari penerapan kebijakan tersebut di bawah kepemimpinan Kim Dae Jung yaitu kemampuan mengatasi krisis ekonomi pada tahun 1997 yang ditunjukkan dengan meningkatnya GDP dan GNP secara signifikan pada tahun 1999 dan mampu menstabilkan kembali perekonomian Korea Selatan. Hingga saat ini, Korea Selatan berhasil menjadi salah satu negara dengan ekonomi maju di kawasan Asia.

Daftar Pustaka

- Choi, W., Dobbs, R., Suh, D., Mischke, J., Chon, E., Cho, H., . . . Kim, H. (2013). *Beyond Korean Style: Shaping a new growth formula*. McKinsey Global Institute.
- Hoa, T. V., & Charles Harvie, . S. (2000). *The Causes and Impact of the Asian Financial Crisis*. Stuttgart: Macmillan.
- Kim, E. M. (1999). CRISIS OF THE DEVELOPMENTAL STATE IN SOUTH KOREA. *Asian Perspective*, 35-55.
- Lee, Y.-i., & Lee, R. (2019). *The Korean Economy: From Growth to Maturity*. New York: Routledge.
- Moon, C.-I., & Mo, J. (2000). *Economic Crisis and Structural Reforms in South Korea*. Economic Strategy Institute.
- Rodier, L. (2014). Assessing the Role of the IMF in South Korea during the Asian Financial Crisis. *Journal of Economics and Development Studies*.
- Shin, D. C. (2012). *Confucianism and Democratization in East Asia*. New York: Cambridge University Press.
- Warsito, Tulus. (2007). *Nosajeong: Rahasia Kebangkitan dan Percepatan Demokrasi Korea*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Weber, E. (1998). *THE IMF AND INDONESIA: TWO EQUAL PARTNERS*. AUSTRALIA: THE UNIVERSITY OF WESTERN AUSTRALIA.
- Annissa, J. (2011). Faktor-Faktor Penyebab Krisis Ekonomi Di Korea Selatan Periode 1997-1998. *Transnasional Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 27-33.
- Arip, B. (2013, May 13). *IMF, Amerika Serikat dan Krisis Finansial Asia 1997-1998*. Retrieved Maret 18, 2019, from Interpreter Maxima: <https://interpretermaxima.wordpress.com/2013/05/13/imf-amerika-serikat-dan-krisis-finansial-asia-1997-1998/>
- BBC News. (2016, November 30). *Krisis politik Korea Selatan, rakyat 'cari kesempatan baru'*. Retrieved May 8, 2019, from BBC News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-38145298>

- Hayo, B., & Shin, D. C. (2002). Popular Reaction to the Intervention by the IMF in the Korean Economic Crisis. *The Journal of Policy Reform*, 89-100.
- International Monetary Fund. (1997, Desember 5). *REPUBLIC OF KOREA*. Retrieved Juni 4, 2019, from International Monetary Fund: <https://www.imf.org/external/np/oth/korea.htm>
- KBS WORLD RADIO. (2015, September 22). *Meloncat dengan mengatasi krisis ekonomi*. Retrieved Desember 16, 2018, from KBS WORLD RADIO: http://world.kbs.co.kr/service/contents_view.htm?lang=i&menu_cate=history&id=&board_seq=3846&page=6&board_code=
- Lavinda. (2018, May 18). *Baht, Peluit Krisis Mata Uang Asia*. Retrieved April 25, 2019, from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180502033958-532-294984/baht-peluit-krisis-mata-uang-asia>
- Leightne, J. E. (2007). Thailand's Financial Crisis: Its Causes, Consequences, and Implications. *Journal of Economic Issues*.
- Menocal, V. F. (2006). (Re)building Developmental States: From Theory to Practice. *Working Paper 274*.
- NST, E. D. (2016). IMPLEMENTASI KERJASAMA SISTER CITY KOTA BANDUNG DENGAN KOTA SUWON TAHUN 1997-2015 . *Tesis Dari Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 83.
- OECDiLibrary. (2015, May 13). *Country statistical profile: Korea 2015*. Retrieved May 13, 2019, from OECDiLibrary: https://www.oecd-ilibrary.org/economics/country-statistical-profile-korea-2015-1_csp-kor-table-2015-1-en
- Purba, T. S., & Afrizal. (2015). STRATEGI EKONOMI POLITIK SAMSUNG GROUP COMPANY DALAM MENGUASAI PASAR SELULER SMARTPHONE DI INDONESIA. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*.
- Saito, K. (1998, January 12). *Korea's Economic Adjustments Under the IMF-supported Program*. Retrieved April 27, 2019, from International Monetary Found: <https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp012198a>
- Sharma, S. D. (2003). Review Essay: Chaebols and the Korean Financial Crisis. *Indian Journal of Asian Affairs*, 159-168.

UGM, H. (2005, November 15). *SOLUSI KRISIS ALA KOREA SELATAN*. Retrieved Desember 16, 2018, from Universitas Gadjah Mada: <https://ugm.ac.id/id/berita/1019-solusi-krisis-ala-korea-selatan>

Wijaya, M. Z. (2017). *Keberhasilan Korea Selatan dalam Mendukung Industri Galangan Kapal Sebagai Agenda Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Keberhasilan Hyundai Heavy Industri*. Yogyakarta: Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada.

Williamson, L. (2012, July 9). *What eurozone countries can learn from South Korea*. Retrieved Juni 19, 2019, from BBC News, Seoul: <https://www.bbc.com/news/business-18719079>